EFEKTIVITAS BANTUAN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAMBI

¹ Maratun Saadah

¹ Universitas Jambi

Email: saadahalfikri@gmail.com

Jambi, 36361, Indonesia

Abstract

This study aims to see the effectiveness of financial assistance provided to political parties in order to realize party independence in Jambi Province. The presence of political parties is a consequence of the choice of the political system and form of government adopted by a country. Political parties have a central function as components in a democratic country like Indonesia. Political party financial assistance is deemed necessary to be given to political parties to carry out their functions, so that they are independent and free from personal interests. This research is a qualitative research conducted through in-depth interviews and described descriptively. The results showed that although the organizer of the aid in this case was the national and political unitary body of the Jambi Province, it had implemented regulations in accordance with the procedures, but the distribution of financial assistance was hampered due to the presence of parties that did not follow the procedures. Collective disbursement of aid is the cause of delays in the distribution of financial aid and leads to the ineffective use of financial aid funds by political parties as an effort to realize the independence of their parties.

Keywords: Effectiveness; Financial Support; Political Party

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik guna mewujudkan kemandirian partai di Provinsi Jambi. Kehadiran partai politik merupakan konsekuensi dari pilihan atas sistem politik dan bentuk pemerintahan yang dianut sebuah negara. Partai politik memiliki fungsi yang sentral sebagai komponen di negara demokratis seperti Indonesia. Bantuan keuangan partai politik dianggap perlu diberikan kepada partai politik untuk menjalankan fungsinya, agar mandiri dan terlepas dari kepentingan pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam serta dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyelenggara bantuan dalam hal ini adalah badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jambi telah mengimplementasikan regulasi sesuai dengan prosedur, namun penyaluran bantuan keuangan terhambat disebabkan oleh adanya partai yang tidak mengikuti prosedur. Pencairan bantuan yang kolektif menjadi penyebab terlambatnya bantuan keuangan disalurkan dan bermuara pada tidak efektifnya dana bantuan keuangan digunakan oleh partai politik sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian partainya.

Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Efektivitas; Partai Politik

PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik di negara demokratis adalah suatu keniscayaan, tidak ada satupun negara demokratis yang tidak menggunakan partai politik dalam mendukung keberadaan sistem politik di suatu negara (Nanou, 2012). Kehadiran partai politik merupakan konsekuensi dari pilihan atas sistem politik dan bentuk pemerintahan yang dianut sebuah negara (MacDermid, 2007), hal ini dikarenakan penyusunan sistem pemerintahan dalam negara ditentukan oleh komposisi partai politik pada hasil pemilu. Partai politik dalam hal ini adalah sumber pemerintahan, yang menjadi cerminan sistem politik dan susunan pemerintahan sebuah negara.

Partai politik sejatinya lahir dari negara – negara Eropa Barat sebagai akibat dari meluasnya pemikiran mengenai komponen rakyat sebagai kekuatan yang perlu dipertimbangkan dalam proses politik (Yusdiyanto, 2015). Berdasarkan asumsi ini, maka kelahiran partai politik tidak dapat dihindari dan perkembangannya menjadi cara untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Partai politik dalam hal ini dianggap sebagai apa yang diaggas oleh (Stokes, 1999) sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah.

Selain itu, partai politik juga dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau dalam proses memodernisasikan diri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan (Schmitter, 2011) yang menyebutkan bahwa dalam suatu negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi, terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting sebagai perantara kepentingan masyarakat, yaitu partai politik, asosiasi kepentingan, dan gerakan sosial. Aktor – aktor yang kemudian dalam konsep negara bangsa dan konsep kota cerdas dianggap sebagai pilar perwujudan governansi cerdas (Saadah, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2008 mengenai Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasaribu, 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka partai politik sebagai infrastruktur politik mempunyai tanggung jawab dalam mengamalkan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran partai politik bagi negara demokratis, maka disusunlah berbagai regulasi yang mengatur bantuan keuangan untuk partai menjalankan fungsinya. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa harus negara, sedangkan partai memiliki banyak sumber pendanaan lain. Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik yaitu pertama dari internal partai sendiri (Wiltse, La Raja, & Apollonio, 2019), seperti iuran anggota partai, sumbangan dari

kader partai yang telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil rakyat di parlemen. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa keuangan partai banyak disumbang dari sumbangan pihak swasta (Nordholt, 2012) termasuk orang kaya sebagai individu, perusahaan atau badan usaha swasta, kelompok masyarakat atau organisasi yang bersifat sebagai *lobbyist*). Ketiga, pembiayaan dari negara atau disebut sebagai public funding (Gauja et al., 2020). Pandangan ini dihasilkan berdasarkan asumsi bahwa mengingat peran partai politik dalam kehidupan politik di suatu negara sangat penting, maka negara perlu membiaya operasional partai.

Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik (Yanuarti, 2020). Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina (Hafild, 2008). Bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada asumsi bahwa partai politik sesuai dengan definisinya adalah organisasi yang dibentuk atas dasar persamaan pandangan politik dan cita – cita terhadap penyelenggaraan negara yang ideal (Adam, Betaubun, & Jalal, 2021), maka partai tersebut seyogyanya melakukan advokasi atas kepentingan politik anggota (Najib, 2020)

Bantuan partai politik (selanjutnya dalam tulisan ini disebut banparpol) dari pemerintah kepada partai politik kemudian diatur melalui beberapa regulasi. Penyempurnaan regulasi terus dilakukan dan bermuara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (**Permendagri Nomor 38 tahun 2018** yang sepenuhnya telah merangkum peraturan teknis tentang penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) di daerah.

Selain itu, berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dana parpol dapat berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Bentuk sumbangan dapat diberikan berupa uang, barang, dan/atau jasa. Disamping itu, parpol juga menerima dana dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/D). Dana ini disebut dengan bantuan keuangan partai politik (banparpol). Banparpol tersebut diberikan kepada parpol yang mendapatkan perolehan suara sah saat memperebutkan bangku di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) provinsi/DPRD kota/kabupaten berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Pemberian banparpol bertujuan untuk melindungi para parpol dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain, jika partai politik memiliki ketergantungan kepada para pemberi sumbangan baik itu dari perseorangan maupun badan usaha, maka para penyumbang tersebut bisa leluasa mengambil alih kepentingan publik menjadi kepentingan

pribadi. Tidak dapat dipungkiri, maraknya korupsi di Indonesia selalu dapat dikaitkan dengan kepentingan pendukung kepala daerah, maupun aktor politik lain melalui partai politik pengusungnya (Faisal, Barid, & Mulyanto, 2018). Mengingat mahalnya biaya politik seperti kampanye, maka sumbangan dan pendanaan dari pengusaha sangat memungkinkan menjadi pilihan bagi aktor politik. Sebagai akibatnya korupsi anggaran diikuti dengan tidak terbukanya pengelolaan dana partai politik marak terjadi (Mei Susanto, 2017). Selanjutnya, bantuan keuangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian parpol dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah. Jika parpol mampu mandiri dalam mengelola dananya, maka parpol dapat terselamatkan dari politik uang.

Besaran bantuan keuangan ditetapkan melalui permendagri no 38 tahun 2008 sebesar minimal Rp.1200,- hingga jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah / suara sah yang didapatkan dalam pemilu. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang menetapkan banparpol paling rendah di Indonesia. Isu rendahnya besaran bantuan ini telah menggema sejak lama (Faisal, 2019), sehingga pada 2019 kementerian dalam negeri telah merencanakan perubahan besaran banparpol naik menjadi Rp.5400,-.

Pandangan administrasi publik melihat bahwa sebuah kebijakan perlu untuk ditinjau efektivitas sebelum merumuskan kebijakan baru. Sehingga dalam tulisan ini penulis secara spesifik akan membahas tentang efektivitas permendagri yang saat ini menjadi landasan hukum bagi Bankesbangpol dalam menyalurkan bantuan keuangan pada partai politik terhadap tujuan kemandirian partai politik di Provinsi Jambi.

Peraturan adalah hukum positif yang merupakan kondisi yang dicita – citakan. Pada kenyataannya, implementasi peraturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dicita – citakan. Demikian pula dengan peraturan atau regulasi pemberian bantuan keuangan pada partai politik ini, permendagri yang telah dijelaskan diatas nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa ketidaksesuaian terjadi disebabkan oleh kurangnya persyaratan administrasi partai politik itu sendiri yang tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh regulasi.

Bankesbangpol Provinsi Jambi mengakui hal tersebut selalu menjadi kendala dalam penyaluran dan terulang hampir di setiap tahun. Yang pertama adalah keterlambatan, partai politik tidak mengumpulkan berkas sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, meskipun tidak semua partai, namun hal ini akan berpengaruh pada proses untuk seluruh partai.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat naratif (Sugiono 2016). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual secara rinci dan melukiskan realita yang ada. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri sehingga dapat menggali masalah yang ada dalam masyarakat (Manab, 2015). Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bankesbangpol Provinsi Jambi, Kepala Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan (LP) di Bankesbangpol Provinsi Jambi, serta melibatkan beberapa partai politik yang menerima bantuan keuangan yaitu, Partai Berkarya, Partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai PAN. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Jambi.

Penyempurnaan regulasi bantuan keuangan bermuara Peraturan Menteri Dalam Negeri **(Permendagri) Nomor 38 tahun 2018** yang sepenuhnya telah merangkum peraturan teknis tentang penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik. Peraturan ini terdiri dari 41 Pasal yang terbagi menjadi 10 BAB. Pasal 1 menerangkan tentang definisi konsep yang digunakan dalam peraturan ini. Pasal 2 dalam peraturan ini mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan. Berdasarkan peraturan ini disebutkan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diberikan setiap tahun dan bersumber dari APBD Provinsi. Kemudian, jumlah atau besaran bantuan adalah berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada pasal 5 disebutkan pula besaran bantuan kepada partai politik tingkat daerah Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.

Besaran ini dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan. Keinginan pembuat kebijakan untuk menaikkan besaran bantuan keuangan bukan tanpa alasan, anggota dewan yang merupakan anggota atau diusung

oleh partai politik tentu akan memperjuangkan kepentingan partai. Biaya operasional partai untuk menjalankan fungsi secara baik dibutuhkan dana yang tidak sedikit, menurut pengakuan pengurus partai biaya tersebut seharusnya dapat dinaikkan untuk mencapai masyarakat yang lebih luas.

Perlu digaris bawahi bahwa 60% penggunaan dana bantuan parpol adalah untuk Pendidikan politik yang menurut pasal 28 regulasi ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Pendidikan politik juga dimaksudkan untuk upaya kaderisasi partai, pengkaderan anggota partai politik yang berjenjang dan berkelanjutan (Saputro, 2021). Hal ini dilakukan agar membentuk kader partai yang partisan, tidak hanya sekedar menunggangi partai politik untuk kendaraan maju ke pemilihan.

Pasal 30 peraturan ini mengatur tentang mekanisme palaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban secara formal dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Idealnya, peraturan telah dirumuskan sedemikian rupa untuk memudahkan partai politik dalam pengajuan bantuan keuangan, sekaligus untuk menjamin penyaluran bantuan keuangan dilakukan secara tepat, transparan dan akuntabel. Pasal – pasal dalam peraturan tersebut telah mengatur dengan jelas prosedur dalam pengajuan hingga pelaporan bantuan keuangan untuk partai politik.

Bankesbangpol sudah melakukan sesuai dengan prosedur, mereka sudah menetapkan prosedur syarat administrasi sesuai dengan regulasi kemendagri. Namun kemudian, dalam prosedur persyaratan administrasi, terdapat masalah dalam hal ini yang dialami oleh salah satu partai karena memiliki kepemimpinan ganda. Sehingga mengakibatkan partai tersebut tidak mendapat bantuan keuangan.

Keterlambatan pengumpulan bahan permohonan bantuan keuangan tersebut menjadikan

proses penyaluran bantuan keuangan dilakukan serentak atau kolektif terhadap seluruh partai politik penerima bantuan keuangan. Dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menindaklanjuti bantuan keuangan kepada pihak berikutnya menunggu ketika semua partai politik telah mengajukan berkas permohonan bantuan keuangan tersebut. Penyaluran secara kolektif ini dilakukan karena prosedur dan tata administrasi keuangan dan pelaporan.

Bankesbangpol telah merealisasikan bantuan sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh regulasi. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) adalah per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui terdapat 11 partai yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari bankesbangpol yaitu:

Tabel. 1 Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi untuk Periode 2019-2024

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan per suara (Rp)	Total Bantuan Keuangan (Rp)
1	PDIP	9	264.032	1.200	316.838.400
2	Gerindra	7	214.200	1.200	257.040.000
3	Golkar	7	205.162	1.200	246.194.400
4	Demokrat	7	190.629	1.200	228.754.800
5	PAN	7	187.804	1.200	225.364.800
6	PKB	5	181.438	1.200	217.725.600
7	PKS	5	134.348	1.200	161.217.600
8	PPP	3	104.019	1.200	124.822.800
9	Nasdem	2	106.362	1.200	127.634.400
10	Hanura	2	55.517	1.200	66.620.400
11	Partai Berkarya	1	55.232	1.200	66.278.400
Jumlah		55	1.698.743		2.038.491.600

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jambi, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada periode 2019-2024 dengan nilai Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)/suara dengan total sebesar Rp. 2.038.491.600 (dua milyar tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus) yang diberikan dengan dibagi tiga karena pada akhir periode jabatan.

Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri. Saat ini berdasarkan pengakuan dari

pengurus salah satu partai di Provinsi Jambi diketahui bahwa jumlah besaran banpanpol Provinsi Jambi adalah yang terendah di Indonesia yaitu sesuai dengan ambang bawah minimum.

Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Jambi.

Dalam pandangan administrasi publik sebuah kebijakan ataupun regulasi harus dilakukan pengukuran atas keberhasilannya (Snellen & van de Donk, 1998). Pengukuran keberhasilan dapat ditinjau melalui salah satunya pendekatan efektivitas. Pendekatan ini beranggapan bahwa suatu program dapat dikatakan berhasil jika memiliki ketepatan sasaran, terdapat sosialisasi program, tercapainya tujuan program dan adanya monitoring atau pemantauan dalam penyelenggaraannya.

Sebagai akibat dari kurang lengkapnya syarat administrasi dari salah satu partai, maka pencairan atau penyaluran dana bantuan partai politik menjadi terlambat. Dalam rangka penguatan demokrasi dan pengelolaan negara yang lebih baik, pengelolaan keuangan negara harus diperhatikan. Sesuai dengan peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oleh karena itu, setiap parpol diwajibkan melaporkan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) atas banparpol yang bersumber dari APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa (UU Nomor 2 Tahun 2011).

Berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik digunakan sesuai peruntukan, hal ini terlihat dari laporan pertanggungjawaban tahun lalu. Namun, pada kenyataannya realisasi bantuan keuangan tersebut belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan yaitu pendidikan politik yang menyasar kepada masyarakat luas.

Bantuan keuangan yang diberikan banparpol kepada partai politik di Provinsi Jambi sebenarnya sangat memberikan manfaat bagi keuangan partai politik untuk melepaskan diri dari ketergantungan donor. Namun, masalah utama dari penyaluran bantuan tersebut adalah keterlambatan penyaluran bantuan. Hal ini berakibat pada masih banyak partai yang bergantung pada sumbangan dari pengusaha maupun elit politik.

(Keban, 2014) menyangsikan kualitas efektivitas kebijakan yang ada di Indonesia berdasarkan fakta bahwa masih minimnya kajian tentang efektivitas yang didukung dengan sistem anggaran pemerintah. Hal ini mengarah pada luaran dari kebijakan menjadi agenda – agenda kegiatan yang bersifat pragmatis, minim dampak menjurus pada tingkat efektivitas yang buruk.

Permasalahan keterlambatan pencairan anggaran sebetulnya telah dikemukakan oleh (Keban, 2014) sebagai salah satu penyebab buruknya kualitas efektivitas dari sebuah program. Hal ini dikarenakan program tidak dijalankan sesuai dengan rentang waktu yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Keterlambatan dana berarti program

hanya memiliki waktu yang sedikit sehingga pengerjaan terkesan serampangan, terjadi pemaksaan untuk menghabiskan dana dalam waktu yang singkat.

Disinilah partai politik menghadapi situasi dilematis: di satu pihak, untuk membiayai kegiatan operasional dan memenangkan pemilu, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan perseorangan maupun perusahaan dapat mengganggu eksistensi partai.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi permendagri sudah berjalan sesuai prosedur, syarat administrasi dan verifikasi dilakukan dengan baik oleh bankesbangpol.
2. Realisasi penyaluran bantuan dari pihak partai politik menghadapi kendala diantaranya yang paling besar adalah sistem penyaluran yang bersifat kolektif, membuat bantuan tersebut sering mengalami penundaan. Akibatnya penyerapan dana bantuan menjadi tidak maksimal dan menimbulkan penyelewengan penggunaan anggaran seperti pemalsuan kegiatan.
3. Kebijakan bantuan keuangan pada partai politik di Provinsi Jambi belum efektif untuk menjawab kebutuhan partai agar mandiri dari donor, hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan pencairan dana bantuan yang menyebabkan banyak agenda kegiatan partai dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan.
4. Dampak bantuan partai politik bagi partai politik sangat bermanfaat. Bantuan keuangan yang diberikan banparpol kepada partai politik di Provinsi Jambi sebenarnya sangat memberikan keleluasaan bagi keuangan partai politik untuk melepaskan diri dari ketergantungan donor.

REFERENSI

- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021). Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>
- Faisal, A. (2019, November 30). Perlu kah dana bantuan partai politik dinaikkan? . Retrieved February 1, 2022, from ANTARA News website: <https://www.antaranews.com/berita/1187455/perlu-kah-dana-bantuan-partai-politik-dinaikkan>
- Faisal, Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *INTEGRITAS Volume 04 Nomor 1 Tahun 2018*.
- Gauja, A., Mills, S., Miragliotta, N., Tham, J. C., Nwokora, Z., & Anderson, M. (2020). The Impact of Political Finance Regulation on Party Organisation. *Parliamentary Affairs*.

<https://doi.org/10.1093/pa/gsy028>

- Hafild, E. (2008). Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. *Laporan Studi, Jakarta: Transparency Internasional*
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu Edisi 3. In *Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.*
- MacDermid, R. (2007). Political Parties and Political Systems: The Concept of Linkage Revisited. *Canadian Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/s0008423907071077>
- Manab, H. A. (2015). Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif. In *Kalimedia.*
- Mei Susanto. (2017). Model Alternatif Pendanaan Partai Politik. *Jurnal Kajian.*
- Najib, A. A. (2020). Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Nurani Hukum*. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>
- Nanou, K. (2012). Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy. *West European Politics*. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.706423>
- Nordholt, H. S. (2012). Decentralization and democracy in Indonesia: Strengthening citizenship or regional elites? In *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*. <https://doi.org/10.4324/9780203155011-26>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Saadah, M. (2021). Artificial Intelligence for Smart Governance; towards Jambi Smart City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012030>
- Saputro, R. H. (2021). Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang. *Journal Civics & Social Studies*. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1222>
- Schmitter, P. (2011). The future of "Real-Existing" Democracy. *Society and Economy*. <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.2.9>
- Snellen, I. T. M., & van de Donk, W. G. H. V. (1998). Public Administration in an Information Age Informatization Developments and the Public Sector , 6. *Informatization Developments in the Public Sector.*
- Stokes, S. C. (1999). Political parties and democracy. *Annual Review of Political Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>
- Wiltse, D. L., La Raja, R. J., & Apollonio, D. E. (2019). Typologies of party finance systems: A comparative study of how countries regulate party finance and their institutional foundations. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*. <https://doi.org/10.1089/elj.2018.0493>
- Yanuarti, S. (2020). Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.818>
- Yusdiyanto, Y. (2015). TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>